



Kerja Sama Pertamina dan Ditpolair Bongkar Aksi Penimbunan Ilegal Solar Subsidi

Ditpolair Korpolaair Baharkam Polri Brigjen M Yassin Kosasih (kedua dari kiri) bersama Dirpolair Polda Jateng, Kombes Pol Raden Setijo Nugroho Hasto Harjo Putro (kanan) dan Pertamina membongkar aksi penimbunan ilegal atas solar subsidi di wilayah Jawa Tengah, Senin (18/10/2021). Adanya praktek penyalahgunaan semacam ini telah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat terutama pengguna BBM bersubsidi seperti angkot dan nelayan yang dirampas haknya oleh oknum tidak bertanggung jawab, serta mengakibatkan pula subsidi negara tidak tepat sasaran.

Wapres Apresiasi Kontribusi PLN Hadirkan Listrik di Desa Terpencil

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi PT PLN (Persero) yang dapat menjalankan program Listrik Desa dengan optimal. Pasalnya target pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024 salah satunya dilakukan melalui penyediaan listrik sebagai kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin.

Dalam rapat koordinasi (rakor) di Kantor Gubernur Maluku, Ma'ruf Amin menuturkan, penyediaan listrik untuk masyarakat miskin yang dilakukan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik untuk Masyarakat Miskin merupakan program penting. Mengingat salah satu penyebab kemiskinan dan ketimpangan adalah tidak adanya akses terhadap infrastruktur dasar, berupa listrik, air bersih dan sanitasi.

"Pengentasan kemiskinan ekstrem ini, sesuai dengan program yang sudah ada. Ini sudah dikoordinasikan dengan daerah, penanggulangan ini terdiri dari anggaran pemerintah



Ma'ruf Amin

pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," kata Ma'ruf dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/10).

Melihat showcase penyediaan listrik untuk masyarakat miskin yang dilakukan melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik untuk Masyarakat Miskin di Maluku, Ma'ruf pun mengapresiasi PLN. Dia juga optimis program ini dapat menggerakkan perekonomian warga, sehingga kesejahteraan warga Provinsi Maluku semakin meningkat.

"Semoga setelah dapat listrik (dengan penyambungan) gratis, anak-anak

belajar dengan nyaman, suasana di rumah juga bisa beraktivitas dengan lancar di malam hari," ujarnya.

Program Listrik Desa merupakan satu dari sekian program pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah prioritas. Pemerintah Provinsi Maluku juga memiliki beberapa program lain untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat.

Program Listrik Desa di lima kabupaten prioritas di Provinsi Maluku, yakni Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Daya, dilakukan PLN dengan menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Khusus untuk Kabupaten Maluku Tengah, program penyediaan listrik bagi masyarakat miskin ekstrem diberikan ke rumah tangga di wilayah tanpa listrik PLN (off grid), maupun wilayah tersedia listrik PLN (on grid). (rap)

Dukung EBT di Indonesia, Bright PLN Batam Pasang PLTS Atap di Lokasi Pelanggan

JAKARTA - Bright PLN Batam bersama PT Karya Teknik Utama melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di lokasi bangunan dan pabrik pelanggan. Lokasi pemasangan PLTS yang dimaksud adalah kawasan pabrik PT Karya Teknik Utama di Sungai Binti, Sagulung.

Dalam sambutannya Direktur Utama bright PLN Batam, Nyoman S. Astawa mengatakan bahwa pemasangan PLTS Atap ini merupakan bentuk komitmen bright PLN Batam dalam mendukung Transformasi PLN, yaitu Green, dengan mendorong penggunaan energi rendah karbon yang ramah lingkungan, khususnya dengan memanfaatkan Energi Baru

Terbarukan (EBT) dalam penyediaan energi listrik.

"Kami sangat menyambut baik penandatanganan MoU ini, selain sebagai sarana untuk mendukung sistem kelistrikan PT Karya Teknik Utama melalui Energi Baru Terbarukan, MoU ini juga menunjukkan semakin meningkatnya minat pelanggan bright PLN Batam untuk menggunakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan," ucap Nyoman dalam acara penandatanganan MoU di Kantor Korporat bright PLN Batam, pekan lalu.

Nyoman juga menjelaskan untuk pemasangan pelanggan cukup menyediakan lokasi dan tempat saja, sedangkan perangkat PLTS Atap seluruhnya disiapkan oleh bright PLN Batam. Sehingga pelanggan tidak perlu melakukan pembelian

atau investasi perangkat PLTS untuk dapat menikmati dan mengklaim penggunaan energi PLTS Atap. "Kami akan terus berinovasi dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada guna meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Sebab, pengembangan Energi Baru Terbarukan bukan semata hanya untuk pemenuhan target pemerintah, tetapi dilakukan sebagai tanggung jawab bright PLN Batam untuk generasi mendatang," pungkas Nyoman.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Karya Teknik Utama, Setiawan berharap dengan adanya MoU ini dapat meningkatkan performa dan kualitas listrik yang disediakan bright PLN Batam pada pabriknya dengan menggunakan sumber energi tambahan. (es)

Co-firing PLTU Butuh Kejelasan Pasokan dan Harga Biomassa

JAKARTA – Untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23% pada 2025, *co-firing* atau pencampuran biomassa sebagai bahan bakar PLTU menjadi salah satu andalan pemerintah dan PT PLN (Persero). Namun, *co-firing* untuk PLTU in butuh kejelasan mengenai pasokan serta harga biomassa, mengingat saat ini masih dibayangi ketidakpastian pasokan dan tingginya harga.

Oleh Retno Ayuningtyas

Mengacu Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, *co-firing* rencananya akan diimplementasikan di 52 PLTU. Untuk mencapai target bauran energi terbarukan 23%, pemanfaatan biomassa diperkirakan harus mencapai 10-20% dari total kebutuhan bahan bakar PLTU. Dengan capacity factor sekitar 70%, pemanfaatan biomassa itu ekuivalen dengan kapasitas 2.700 megawatt (MW). Kebutuhan biomassa untuk mencapai target itu diproyeksikan mencapai 8-14 juta ton per tahun.

Dalam RUPTL juga disebutkan bahwa besarnya kebutuhan biomassa menjadi tantangan implementasi *co-firing*. Pemerintah dan stakeholder diharapkan dapat memastikan keberlangsungan pasokan biomassa dalam jangka panjang. Tak hanya itu, pemerintah harus dapat mengendalikan harga biomassa tetap kompetitif sehingga tidak berdampak pada peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

Analisis Keuangan Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna menuturkan, jika dipaksa berjalan, program *co-firing* PLTU ini akan menimbulkan beban keuangan tambahan. Wa-



Putra Adhiguna

laupun, pihaknya belum dapat menghitung besaran beban ini mengingat belum ada kejelasan jenis biomassa yang akan dipakai PLN. Hal ini mengingat rentang variasi harga dan kualitas biomassa sangat luas.

Namun, lanjutnya, harga biomassa berkualitas dalam beberapa tahun terakhir tercatat sekitar 30-80% lebih tinggi dari harga batu bara PLN. Dengan harga batu bara yang saat ini cukup tinggi, harga biomassa bisa saja lebih kompetitif. "Tetapi perlu diingat bahwa harga komoditas bisa sangat berfluktuasi. Jangan sampai nanti ketika harga batu bara turun, biomassa kembali sulit menguntungkan dan pasokan menjadi terhambat," kata dia dalam pesan pendeknya kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Tak hanya itu, tambah Putra,

Tetapi perlu diingat bahwa harga komoditas bisa sangat berfluktuasi. Jangan sampai nanti ketika harga batu bara turun, biomassa kembali sulit menguntungkan dan pasokan menjadi terhambat.

Putra Adhiguna

kandungan energi dalam biomassa juga sekitar 30-40% lebih rendah dibandingkan dengan batu bara. Dengan demikian, hitungan kebutuhan biomassa mencapai 14 juta ton bisa saja hanya akan menggantikan 8-10 juta ton batu bara. Di sisi lain, masih butuh kejelasan terkait pemasok yang dapat menyediakan biomassa dalam jumlah sebesar itu.

"Sebelum mencapai 14 juta ton, mari kita utamanya melihat bagaimana roadmap dan realisasi 1 juta ton pertama produksi biomassa untuk *co-firing*," ujar Putra. *Co-firing* biomassa menjadi pili-

han mengejar target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 lantaran kondisi kelebihan pasokan setrum (*oversupply*) yang terjadi saat ini. Namun di sisi lain, PLN juga menyadari potensi dampak dari rencana ini, yakni penurunan efisiensi PLTU dan naiknya BPP. Belum lagi kebutuhan investasi yang lebih besar jika porsi biomassa harus mencapai 10-20%. Sejauh ini, PLN baru melaksanakan uji coba *co-firing* biomassa dengan porsi 5% di mana hanya membutuhkan biaya operasional.

Institute of Essential Services Reform (IESR) juga menyoroti rencana implementasi *co-firing* PLTU ini. Lembaga ini menilai, daripada memaksakan *co-firing* harus berjalan, PLN lebih baik fokus mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan untuk mengejar target bauran energi. Langkah PLN dan pemerintah untuk tetap mempertahankan bahan bakar fosil dengan rencana *co-firing* PLTU justru akan menimbulkan risiko *stranded asset* dan lingkungan yang lebih besar.

Sesuai RUPTL, implementasi *co-firing* biomassa di PLTU akan dilaksanakan bertahap. Pada 2021-2021, program ini masih dalam tahap persiapan ekosistem bisnis baik dari sisi komersial, regulasi, maupun kerja sama antara stakeholder, terkait untuk implementasi industri pasokan biomassa, kesiapan teknologi, dan lainnya. *Co-firing* direncanakan baru dapat dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2025.

Pemerintah Perlu Menambah Kuota Solar Bersubsidi

JAKARTA - Pemerintah perlu segera menambah kuota BBM jenis solar bersubsidi yang harus didistribusikan Pertamina. Hal ini untuk menjawab adanya kelangkaan yang sempat terjadi di hampir seluruh wilayah pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung dan beberapa provinsi lain, karena mulai tumbuhnya perekonomian pasca pembatasan yang kemarin dilakukan karena pandemic Covid-19.

"Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan BPH Migas harus segera bertindak cepat dengan segera menyetujui atau meminta kepada Pertamina menambah kuota solar subsidi dan kelebihan kuota tersebut akan di bayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulkan keprihatinan di masyarakat karena kelang-

kaan ini" jelas Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan di Jakarta, Minggu (17/10).

Menurut Mamit, patut disyukuri bahwa saat ini roda perekonomian kembali tumbuh setelah cukup lama dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya permintaan solar subsidi yang cukup signifikan sedangkan disisi lain solar subsidi itu dibatasi oleh kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas.

Disisi lain, Mamit mengatakan bahwa Pertamina dalam hal ini sub holding Pertamina Patra Niaga (PPN) menjaga agar sisa kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPH Migas cukup sampai akhir tahun 2021 ini.

"Pertamina pastinya akan menyesuaikan sisa kuota setiap

propinsi agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Pertamina tidak bisa serta merta menambah kuota tanpa ada persetujuan ataupun perintah dari Pemerintah dan juga BPH Migas untuk menambah jumlah solar subsidi yang beredar karena terkait dengan penggantian dana subsidi yang diterima oleh Pertamina" terang Mamit kembali.

Selain itu, Mamit juga menyampaikan bahwa kenaikan harga CPO sepanjang 2021 ini bisa menjadi penyebab ketersediaan stock bbm solar subsidi terganggu. Hal ini disebabkan untuk bbm solar subsidi merupakan program solar B30.

"Kenaikan harga CPO yang melejit sampai 75% jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME

sebagai bahan campuran B30 ini. Jadi, pemerintah harus membuat regulasi harga atau DMO CPO untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan" ujar Mamit

Mamit juga memberikan usulan saat harga FAME mengalami kenaikan, maka Pertamina bisa diberikan kelonggaran untuk menjual bbm solar subsidi murni tanpa di campur dengan FAME.

"Ini semua demi kelancaran mobilitas kendaraan umum serta demi membantu perekonomian yang sudah mulai tumbuh ini. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual bbm solar subsidi B30 ke masyarakat" demikian menurut Mamit. (es)



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, dan anggaran dasar PT Indosat Tbk ("Perseroan"), dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan RUPS LB, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 26 November 2021

Tempat : Gedung Indosat Ooredoo Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110

Mekanisme : RUPS LB secara elektronik

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS LB adalah:

a. Bagi yang sahamnya pada Perseroan belum dimusnahkan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian SentralEfeKIndonesia ("KSEI"), hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 November 2021 pukul 16.00 WIB; dan

b. Bagi yang sahamnya pada Perseroan berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 3 November 2021 pukul 16.00 WIB.

Perseroan menghimbau pemegang saham untuk (i) menghadiri rapat dan memberikan suara secara elektronik atau (ii) memberikan suaranya melalui fasilitas eASYKSEI (disediakan oleh KSEI) sebagai alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan RUPS LB. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pengumuman RUPS LB sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS LB.

Pengumuman untuk RUPS LB akan diumumkan paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web eASYKSEI pada tanggal 4 November 2021.

Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS LB adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara RUPS LB diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dengan memenuhi syarat berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengumuman RUPS LB.

Jakarta, 19 Oktober 2021
PT INDOSAT TBK
Direksi

ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

In accordance with Indonesia Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies, OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, and the articles of association of PT Indosat Tbk ("Company"), this announcement serves to inform the shareholders of the Company that the Company will convene an EGMS, which will be held on:

Date : Friday, 26 November 2021

Venue : Gedung Indosat Ooredoo Jalan Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110

Mechanism : Electronic EGMS

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the EGMS are:

a. For those whose shares in the Company have not been electronically registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral EfeK Indonesia ("KSEI"), only the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register as at 4.00 p.m. (Western Indonesia Time) on 3 November 2021; and

b. For those whose shares in the Company are in the Collective Custody of KSEI, only the account holders whose names are registered as the Company's shareholders in the securities account of the Custodian Bank or Securities Company as at 4.00 p.m. (Western Indonesia Time) on 3 November 2021.

The Company encourages the shareholders to either (i) attend and vote electronically, or (ii) issue their power of attorney through eASYKSEI platform (provided by KSEI) as an alternative mechanism to electronically give power of attorney for participation at the EGMS ("e-Proxy"). This e-Proxy facility is available to shareholders who are entitled to attend the EGMS from the date of the EGMS invitation up to 1 (one) business day prior to the date of the EGMS.

The invitation of the EGMS will be announced through at least 1 (one) nation-wide Indonesian language daily newspaper, the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and eASYKSEI website, on 4 November 2021.

The shareholders who may propose EGMS agenda items shall be 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights. The proposal of EGMS agenda(s) shall be submitted in writing to the Board of Directors of the Company by taking into account the requirements under the Company's articles of association and the prevailing regulations no later than 7 (seven) days prior to the invitation of the EGMS.

Jakarta, 19 Oktober 2021
PT INDOSAT TBK
The Board of Directors